



Deforestasi berlanjut di satu konsesi pemasok SMG/APP di Riau

Hutan alam ditebangi pada gambut dalam di habitat harimau setelah moratorium dicanangkan



Laporan Investigasi
Eyes on the Forest

Dipublikasikan Mei 2013

Eyes on the Forest
(EoF) adalah sebuah koalisi LSM lingkungan hidup di Riau, Sumatra:
WALHI Riau, Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Alam Riau) dan WWF-Indonesia Program Riau.
EoF memantau status hutan alam yang tersisa di Provinsi Riau, Sumatra dan

menyebarkan informasi ke seluruh dunia.
Untuk mendapatkan berita lebih lanjut mengenai

Eyes on the Forest
, kunjungi: <http://www.eyesontheforest.or.id>
Untuk foto dan peta, kunjungi: <http://maps.eyesontheforest.or.id>
Email: [editor\(at\)eyesontheforest.or.id](mailto:editor(at)eyesontheforest.or.id)

Sampul Depan

Antrean panjang tumpukan kayu keras tropis campuran (MTH) tepi selatan konsesi hutan alam PT RIA untuk diangkut oleh truk ke dermaga log. Foto diambil oleh Eyes on the Forest pada 0 ° 4'34 .98 "N, 102 ° 57'0 .79" E (lokasi 4 di Peta 1) tanggal 6 April 2013.

Pendahuluan

PT Asia Pulp & Paper milik Sinar Mas Grup (SMG/APP) menerbitkan “Kebijakan Konsevasi Hutan” /FCP) pada 5 Februari 2013 dengan mengumumkan “penghentian penebangan hutan alam di seluruh rantai pasokannya di Indonesia, yang segera berlaku”¹. Kebijakan tersebut menyebutkan:

- *“APP dan seluruh pemasok hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian HCVF dan HCS secara independen*
- *“tidak akan ada aktifitas pembangunan kanal atau infrastruktur di area di area konsesi lahan gambut yang belum ada pembangunan HTI, hingga proses penilaian HCVF telah selesai dilakukan yang sudah melalui rekomendasi dari ahli lahan gambut.”*

SMG/APP menyiapkan berbagai protokol untuk menerapkan kebijakan ini, termasuk Protokol Moratorium Clearance (Penebangan). Rancangan Protokol yang disampaikan pada 13 Februari 2013 saat “Focus Group Discussion” (FGD, diskusi kelompok fokus) dengan beberapa LSM ini menetapkan:

- *“Penebangan dan pembukaan lahan dihentikan paling lambat 31 Januari 2013. Baik di areal tegakan hutan alam, maupun di areal Lahan Terbuka (LT), dan Belukar Muda (BM) sampai adanya verifikasi.”*
- *“Semua unit alat-alat berat (A2B) yang dipergunakan untuk kegiatan penebangan, pembukaan lahan, pembuatan jalan dan kanal (sesuai daftar yang diserahkan) disimpan di tempat yang ditetapkan”.*

Dalam sebuah surat kepada Mongabay, menjawab pertanyaan “apakah hutan alam dapat ditebang apabila tidak memenuhi kriteria Nilai Konservasi Tinggi (HCV) Stok Karbon Tinggi (HCS),” APP mengatakan:

- *“Jawaban singkatnya adalah tidak. Dalam keadaan apapun, hutan alam tidak dapat dibuka di bawah kebijakan baru. Untuk mencapai identifikasi sebagaimana juga perlindungan, kami menggunakan penilaian HCV dan klasifikasi HCS. Ini lebih kompleks daripada sekedar membagi lahan menjadi salah satu jenis atau yang lain, karena sebenarnya ada enam klasifikasi, yang diidentifikasi menggunakan kedua pekerjaan lapangan dan analisis satelit. Dalam urutan nilai dari yang terbesar ke yang terkecil, mereka termasuk hutan kepadatan tinggi, hutan kepadatan sedang, hutan kepadatan rendah, belukar tua dan muda, dan lahan ditebangi atau terbuka. Empat pertama termasuk ke dalam klasifikasi HCS. Sebelum selesainya studi HCS kami, hanya dua yang terakhir yang tersedia untuk izin atau penggunaan oleh APP dan pemasok, dan juga hanya ketika penilaian HCV dan lahan gambut telah diselesaikan.”²*

“Apakah semua para pemasok SMG/APP memenuhi kebijakan baru dan ketentuan protokol ini?”

Jawaban singkat kami adalah tidak.

Pada Maret 2013, LSM-LSM di Kalimantan Barat menemukan bahwa dua pemasok lokal SMG/APP melakukan pelanggaran terhadap kebijakan dan ketentuan protokol di atas.³ Pada awal April, konsultan APP, The Forest Trust (TFT), menentang rekomendasi oleh kalangan LSM, dengan mengadakan sebuah “audit verifikasi” sendirian dan LSM menegaskan bahwa penebangan hutan dan pembuatan kanal gambut terjadi seperti yang

diduga selama periode moratorium. TFT mengklaim bahwa para pemasok tidak melanggar moratorium APP karena kegiatan-kegiatan dilakukan oleh para pemegang izin yang tumpang-tindih lahannya. TFT “mengatur” para pemasok untuk secara hukum mengemban tanggung jawab demi melindungi konsesi-konsesi^{4, 5}. TFT juga menyatakan, “Rencana membuat kanal untuk akses kayu tebangan, yaitu kayu yang ditebang sebelum 1 Februari 2013, telah didiskusikan dan disetujui antara TFT, ATP dan APP di Februari 2013. Ringkasnya, tidak ada hutan baru ditebangi dan tidak ada pelanggaran Kebijakan Konservasi Hutan APP.” TFT selanjutnya menegaskan bahwa kesepakatan rahasia dibuat setelah pengumuman kebijakan baru dan tanpa kajian setara yang mempublikasikan penilaian HCV, HCS dan gambut yang merekomendasikan bahwa kanal-kanal di lahan gambut bisa dibuat⁶.

Pada April 2013, hasil investigasi Eyes of the Forest (EoF) menemukan bahwa satu pemasok di Provinsi Riau, yaitu PT. Riau Indo Agropalma (RIA) tampaknya melanggar kebijakan dan ketentuan protokol di atas.

Hasil temuan

Investigasi EoF antara tanggal 5 dan 8 April 2013 mendapati PT. Riau Indo Agropalma (RIA), pemasok “independen” SMG/APP, masih menebangi pepohonan hutan alam di blok Kerumutan. Pemasok ini seharusnya menerapkan “moratorium” yang digagas oleh SMG/APP.

Sedikitnya ada tujuh ekskavator yang diamati aktif melakukan pembukaan hutan alam di dalam konsesi. (Foto 1, diambil di lokasi 10 pada Peta 1). Video ekskavator menebang pohon-pohon ditayangkan di: <https://vimeo.com/66048150>.

Pemeriksaan citra Landsat dengan awan yang terbatas menyelimuti daerah investigasi mengungkapkan bahwa pembukaan hutan meningkat luasannya dari tanggal 6 Maret dan 23 April 2013. Tim EoF berjalan di sepanjang perbatasan selatan-barat konsesi (berdasarkan data Kementerian Kehutanan) dan mengamati lahan besar terbuka tersebut telah digunduli dan banyak terdapat tumpukan kayu keras tropis campuran (MTH), telah dipotong-dipotong menjadi beberapa segmen pendek (lihat foto di Peta 1) dan menunggu untuk diangkut oleh truk-truk menuju dermaga PT RIA di Sungai Simpang Kanan.

Tanah gambut di kawasan ini diperkirakan lebih dari 4 meter dalamnya⁷, maka itu berdasarkan hukum tata ruang PP 26 tahun 2008 merupakan kawasan lindung dan hutan tidak boleh ditebang⁸. Blok Kerumutan, termasuk di dalamnya konsesi PT. RIA, ditenggarai sebagai salah satu kunci habitat bagi harimau Sumatera oleh para pakar harimau dunia^{9, 10}. Menurut laporan kemajuan kedua TFT, tidak ada asesmen Stok Karbon Tinggi maupun Nilai Konservasi Tinggi yang telah selesai yang menyebutkan bahwa pembukaan hutan tersebut tidak melanggar FCP APP¹¹. Pada Februari 2009, tiga harimau Sumatera ditemukan tertangkap untuk kepentingan komersil di sebuah desa di sebelah konsesi PT RIA. Kedua pelaku kejahatan dijatuhi hukuman ringan, dikiritik oleh para aktivis lingkungan.^{12, 13, 14}



Foto 1.—Tiga buah ekskavator tertangkap basah pada foto ini sedang melakukan penebangan pepohonan hutan alam di konsesi PT. RIA. Foto diambil oleh Eyes on the Forest pada lokasi 10 di Peta 1 ($0^{\circ}4'38.93''N$, $102^{\circ}57'4.18''E$) tanggal 8 April 2013. Lihat juga video yang ditayangkan di: <https://vimeo.com/66048150>



Peta 1.—Deforestasi dan tumpukan MTH yang ditebang pasca 6 Maret di sepanjang tepi hutan di konsesi PT. RIA.

Kesimpulan

Sebuah pemasok “independen” SMG/APP di Provinsi Riau, Sumatera, masih melakukan aktivitas pembabatan setelah dimulainya moratorium SMG/APP dari tanggal 1 Februari, yang mana adalah pelanggaran terhadap FCP dan ketentuan protokol perusahaan (lihat Pendahuluan). SMG/APP gagal merampungkan “penilaian independen HCVF, HCS dan penilaian pakar gambut” sebelum aktivitas tersebut dilakukan.¹⁵

Rekomendasi Eyes on the Forest bagi SMG/APP

Pada tanggal 24 April, sebelas organisasi masyarakat sipil dan jaringan-jaringan lainnya mengirimkan sebuah surat bersama kepada Asia Pulp & Paper (APP), membahas tentang permasalahan pokok konservasi dan sosial yang APP telah gagal tangani sesuai dengan KKH dan protokol-protokol terkait perusahaan¹⁶. Hasil temuan yang disajikan di laporan investigasi ini menegaskan kekhawatiran organisasi masyarakat sipil mengenai potensi deforestasi yang berkelanjutan dan pengambilan bahan MTH yang bertentangan dengan KKH karena penolakan APP untuk menghentikan pasokan MTH ke semua pabrik, dikombinasikan dengan pemantauan independen yang rupanya tidak lengkap, lemah dan tidak transparan.

Diantara sekian rekomendasi mereka, organisasi-organisasi masyarakat sipil tersebut menyarankan hal-hal berikut terkait isu yang dibahas pada laporan investigasi kali ini:

1. Berhenti menerima semua serat hutan tropis di semua pabriknya per tanggal 5 Mei 2013, tanggal laporan FCP baru kuartal pertama untuk menutup semua potensi celah lemah dari penyalahgunaan dan memantau pelaksanaan utuh FCP baru secara langsung dan tanpa ragu.
2. Memberikan informasi rinci tentang semua konsesi-konsesi para pemasok yang ada dan pernah ada, termasuk informasi tentang batas-batas konsesi, tutupan lahan, kawasan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) yang diidentifikasi oleh para kontraktor SMG/APP, dan memberikan kepada masyarakat sipil akses ke semua konsesi dan fasilitas yang memungkinkan pemantauan FCP yang benar-benar independen oleh pemangku kepentingan
3. Memberikan informasi tentang wilayah konsesi baru dan rencana ekspansi pabrik di Indonesia guna membolehkan organisasi masyarakat sipil untuk secara independen mengevaluasi manfaat konservasi FCP di masa yang akan datang.

Rekomendasi Eyes on the Forest kepada para pembeli APP dan mitra bisnis lainnya

Jangan membeli produk-produk SMG/APP sampai pemantauan yang benar-benar independen oleh EoF telah mengkonfirmasi bahwa perusahaan

- telah berkomitmen untuk memulihkan hutan dan merehabilitasi lahan gambut terpilih yang telah ditebangi atau dirusak di masa lalu dalam kawasan HCV, HCS dan kawasan lindung dalam konsesinya,
- telah berhenti menerima kayu hutan tropis di semua pabriknya,
- telah menyediakan bagi organisasi masyarakat sipil semua data yang diperlukan untuk pemantauan yang benar-benar independen,
- telah menunjukkan rekam jejak yang terbukti dengan keberhasilan pelaksanaan hal-hal di atas dan meningkatkan kebijakan konservasi hutannya untuk jangka waktu tertentu.

SELESAI

*Untuk informasi lebih lanjut, sila hubungi:
Editor Eyes on the Forest
Email: [editor\(at\)eyesontheforest.or.id](mailto:editor@eyesontheforest.or.id)*

References

¹Asia Pulp & Paper (5 February 2013) Asia Pulp & Paper Group (APP) Commits to an Immediate Halt to All Natural Forest Clearance. <http://www.rainforestrealities.com/newsroom/press-releases/app-commits-to-an-immediate-halt-to-all-natural-forest-clearance/>

² A letter by Aida Greenbury, Managing Director, Sustainability, Asia Pulp and Paper Group, published at Mongabay (29 April 2013) APP answers questions on new forest conservation policy. <http://news.mongabay.com/2013/0429-greenbury-app-questions.html>

³RelawanPemantauHutan Kalimantan / Kalimantan Forest Monitoring NGOs (25 March 2013) RelawanPemantauHutan Kalimantan RagukanKomitmen APP padaKonservasiHutan <http://www.wwf.or.id/?27740/Relawan-Pemantau-Hutan-Kalimantan-Ragukan-Komitmen-APP-pada-Konservasi-Hutan> / APP suppliers' continued natural forest clearance and peat canal development shed doubt on APP's forest conservation commitment. http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Joint%20Press%20Release_APP%20FCP%20Violation%20in%20West%20Kalimantan_260313_English_20130326090349.pdf

⁴The Forest Trust (4 April 2013) Verification results related to alleged violations of the natural forest clearance moratorium at PT. Asia TaniPersada and PT. DayaTaniKalbar. http://clients.squareeye.net/uploads/tft/130404_TFT_Verification_Report_-_ATP_DTK_Final.pdf

⁵RelawanPemantauHutan Kalimantan / Kalimantan Forest Monitoring NGOs (9 April 2013) RPHK: Komitmen Forest Conservation Policy PerluLibatkanSemuaPihakdanSebenarnyaLindungiHutandanLahanGambut <http://www.wwf.or.id/en/index.cfm?uNewsID=27920&uLangID=67> / Borneo's RPHK Consortium Rebuts APP and The Forest Trust's Verification Report: APP's Forest Conservation Policy Should Embrace More Relevant Stakeholders and Truly Protect Forest, Peat Lands. <http://www.wwf.or.id/en/?27920/Borneos-RPHK-consortium-rebuts-APP-and-The-Forest-Trusts-Verification-Report-APPs-Forest-Conservation-Policy-should-embrace-more-relevant-stakeholders-and-truly-protect-forest-peat-lands>

⁶ The Forest Trust (7 May 2013) TFT Progress Report on APP Forest Conservation Policy Commitments Reporting period: mid - March to mid - April 2013. <http://clients.squareeye.net/uploads/tft/TFT-APP-second--update-report.pdf>

⁷Wahyunto, S. Ritungdan H. Subagjo (2003).PetaLuasSebaranLahanGambutdanKandunganKarbon di Pulau Sumatera / Maps of Area of Peatland Distribution and Carbon Content in Sumatera, 1990 . 2002. Wetlands International - Indonesia Programme& Wildlife Habitat Canada (WHC). <http://www.wetlands.or.id/PDF/buku/Atlas%20Sebaran%20Gambut%20Sumatera.pdf>

⁸Presidential Decree Number 32/1990 on Management of Protected Area, in conjunction with Act of the Republic ofIndonesia No. 5 of 1990 Concerning Conservation of Living Resources and Their Ecosystems (<http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins3867.pdf>), in conjunction with Law (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA) Nomor26 Tahun 2007 on Spatial Planning (http://landspatial.bappenas.go.id/peraturan/the_file/UU_No26_2007.pdf), inconjunction with Government Regulation (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA) Nomor 26 Tahun 2008 on National Spatial Planning (http://www.bkprn.org/v2/peraturan/file/PP_26_Tahun_2008.pdf) Wetlands International (2011) Peatlands in Indonesia's National REDD+ Strategy. <http://www.wetlands.org/LinkClick.aspx?fileticket=9Nesl6BC11U%3D&tabid=56> See discussion on Presidential Decree.

32/1990 in page 26.

⁹ Sanderson, E., J. Forrest, C. Loucks, J. Ginsberg, E. Dinerstein, J. Seidensticker, P. Leimgruber, M. Songer, A. Heydlauff, T. O'Brien, G. Bryja, S. Klenzendorf and E. Wikramanayake. 2006. Setting Priorities for the Conservation and Recovery of Wild Tigers: 2005-2015. The Technical Assessment. WCS, WWF, Smithsonian, and NFWF-STF, New York – Washington, D.C. http://www.catsg.org/catsgportal/bulletin-board/04_reports/pdf/Sanderson_et_al_2006_Tiger_recovery_technical_assessment.pdf

¹⁰Wibisono, H.T. & W. Pusparini (2010) Review: Sumatran tiger (*Pantheratigrissumatrae*): A review of conservation status. Integrative Zoology 2010 (5) 313-323. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1749-4877.2010.00219.x/pdf>

¹¹ The Forest Trust (7 May 2013)

¹² EoF (19 Oct 2009) It may create bad precedence for wildlife crime law enforcement
<http://eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=244>

¹³ EoF (24 Jul 2009) Two Sumatran tiger poachers tried
<http://eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=238>

¹⁴ EoF (05 Aug 2009) Court case of Sumatran tiger poachers in Sumatra
<http://eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=241>

¹⁵ The Forest Trust (7 May 2013)

¹⁶ Indonesian NGOs joint letter to Asia Pulp & Paper on 24 April 2013. In Bahasa Indonesia:
[http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Surat%20LSM%20ke%20APP%20Final%20\(dikirim%2024%20April2013\)_20130503160533.pdf](http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Surat%20LSM%20ke%20APP%20Final%20(dikirim%2024%20April2013)_20130503160533.pdf) In English:
http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Joint%20NGO%20letter%20to%20APP%20Final%20English%20%28sent%20on%2024Apr13%29rev_20130503160535.pdf